

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil penelitian mengenai evaluasi sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa pada Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, diketahui bahwa dokumen-dokumen yang terdapat dalam setiap tahapan proses pengelolaan Dana Desa yaitu berupa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Umum, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Surat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2015 disertai register penutupan kas dan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap obyek yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kepala Desa Nimasi. Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggungjawaban Dana yang disiapkan Desa Nimasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya dokumen-dokumen buku kas pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran yang seharusnya dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan, tidak adanya buku kas pembantu pajak dan buku bank desa yang harus dicatat atau dibukukan oleh Bendahara Desa Nimasi.

3. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa, pelaksana kegiatan belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyiapkan buku kas pembantu kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dan belum menyiapkan surat permintaan pembayaran untuk diserahkan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa Nimasi.
4. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa belum terlaksana dengan baik karena kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat Desa Nimasi dan tim pelaksana kegiatan masih sangat terbatas.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka disarankan kepada pemegang kuasa pengelolaan keuangan tingkat desa dalam hal ini Kepala Desa serta perangkat Desa Nimasi sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Pemerintah Desa Nimasi melengkapi dokumen-dokumen pencatatan khususnya buku kas pembantu kegiatan, surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa serta laporan kekayaan milik desa sesuai dokumen-dokumen arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Diharapkan agar Pemerintah Desa Nimasi mempertahankan tingkat kepatuhan dan kesesuaian terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikerjakan atau dibukukan dalam proses pengelolaan dana desa dengan

peraturan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (khususnya APBDesa dan RAB).

3. Diharapkan agar Pemerintah Desa Nimasi memperbaiki proses pencatatan buku kas umum, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa sehingga data laporan akhir dapat diandalkan dan dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1991. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Penebit BPFE.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- <https://santriw4n.wordpress.com/2009/11/18/pengertian-dan-konsep-evaluasi-penilaian-dan-pebegukuran>
- <https://navelmangelep.wordpress.com/2012/02/14/pengertian-evaluasi-pengukuran-dan-penilaian-dalam-dunia-pendidikan/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa. *Panduan Pelatih Fasiltator Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*.
- , 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah*.
- Moehar, Daniel Ir. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
- Narko. 2002. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Nusantara.
- , 2014. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- , 2015. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Darah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*.
- , 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN*.
- , 2015. *Peraturan Desa Nimasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015*.
- , 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

-----, 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.*

Sofyan, Syafri Harahap. 1999. *Teori Akuntansi.* Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa.* Bandung: Penerbit Fokusmedia.

-----, 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

-----, 2015. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*